



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKA SUSANTI SAHIDA
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN
3. NHK : 741493

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 485.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 17 m2/10 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 17 m2/10 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, YAMAHA FINO YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 115.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 240.893

F. HARTA LAINNYA Rp. 25.000.000

Sub Total Rp. 634.840.893

III. HUTANG Rp. 266.599.999

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 368.240.894

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.